



Bung Hatta dalam pengasingan di Gunung Menumbing, Pulau Bangka, 1949.

“Demokrasi dapat berjalan baik jika ada rasa tanggung jawab dan toleransi di kalangan pemimpin politik.”

Bagi Hatta, partai adalah wujud kedaulatan rakyat. Tapi, dia mengecam para politisi yang menjadikan “partai sebagai tujuan dan negara sebagai alatnya”.

Demokrasi dapat berjalan baik, menurut Hatta, jika ada rasa tanggung jawab dan toleransi di kalangan pemimpin politik. Sebaliknya, kata dia, “Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki, membuka jalan untuk lawannya: diktator.”

Hatta benar adanya. Pada 1959, antara lain atas desakan militer, Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan parlemen.

Tapi Hatta mengecam semangat ultrademokratis sama kerasnya dengan dia mengkritik kediktatoran. “Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang-seorang tidak lama umurnya” dan “akan roboh dengan sendirinya seperti rumah dari kartu”.

Beberapa tahun sebelum jatuhnya Bung Karno, Hatta telah meramalkan: “sistem yang dilahirkan Soekarno itu tidak lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri”. Dan andai saja Soeharto, yang menggantikan Soekarno setelah 1965, juga menyimak Hatta dengan lebih baik. ■

TEMPO, 18 Agustus 2002



Bung Hatta (kedua, paling kanan) bersama pengacaranya di Belanda (pada 1927), ia ditahan akibat tulisan-tulisannya yang tajam mengkritik pemerintah kolonial.

Negarawan yang Menulis

Setelah kemerdekaan, Hatta lebih bertindak sebagai seorang “administratur”, yang mencoba menerapkan pengalaman akademisnya yang luas ke alam nyata. Dia terlibat dalam penyusunan konstitusi dan menyumbangkan beberapa pasal penting, seperti “hak berkumpul dan berserikat” dan “penguasaan negara atas sumber daya alam”, yang keduanya mencerminkan kepeduliannya pada kedaulatan rakyat serta kehidupan ekonomi mereka.

Memenuhi sumpahnya hanya kawin setelah Indonesia merdeka, dia melamar Rachmi Rahim pada November 1945. Hatta menghadiahi calon istrinya emas kawin yang tidak akan dipikirkan orang lain: buku *Alam Pikiran Yunani* yang ditulisnya sendiri.

Pada awal kemerdekaan itu Hatta juga terlibat dalam pergulatan politik yang diwarnai perpecahan di kalangan pendiri negara. Terpaksa menjadi perdana menteri setelah beberapa kali kabinet jatuh-bangun, Hatta harus menghadapi soal rumit: pemberontakan Madiun, agresi Belanda, diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, dan pembentukan tentara nasional.

Namun, di sela-sela kesibukannya, dia masih menulis artikel ataupun buku. Topik perhatiannya sangat luas, dari politik, koperasi dan perbankan, hingga tentang Islam dan demokrasi. Dia setidaknya dua kali menulis di *Foreign Affairs*, sebuah jurnal prestisius internasional tentang kebijakan luar negeri. Di situlah Hatta menyodorkan konsep politik luar negeri yang “bebas dan aktif”, yang diadopsi pemerintah Indonesia hingga kini.

Ketika wafat pada 1980, Hatta meninggalkan “30 ribu judul buku” dalam perpustakaan pribadi, sebagai warisannya yang termahal. Integritas dan kesederhanaan hidup menjadikannya mutiara yang langka di antara deretan pemimpin Indonesia masa kini maupun lampau. Tapi dia lebih langka lagi sebagai negarawan yang menulis. ■

TEMPO, 18 Agustus 2002



Hatta (berdiri, kedua dari kiri) dan para pengurus Perhimpunan Indonesia, 1925.

Perubahan nama itu menunjukkan meningkatnya keberanian para aktivis untuk menggunakan kata Indonesia sebagai nama organisasi.

Bilderdijkstra letaknya tak jauh dari kampus Universitas Leiden. Berawal dari pertemuan-pertemuan kecil di tempat itulah Perhimpunan Indonesia berdiri. Mula-mula bernama Indische Vereeniging, lalu Indonesische Vereeniging sebelum beralih nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama itu menunjukkan meningkatnya keberanian para aktivis untuk menggunakan kata Indonesia sebagai nama organisasi.

Selain menjalin gerakan, mereka juga menerbitkan banyak publikasi. Satu di antaranya *Gedenkboek Indonesische Vereeniging*—buku yang terbit pada April 1924, seiring dengan ulang tahun organisasi itu. “Aku masih sempat membuat karangan untuk buku peringatan itu dalam bahasa Melayu. Judulnya, ‘Indonesia di Tengah-Tengah Revolusi Asia’,” kenang Hatta. Terbitnya buku itu disambut oleh kritik keras pers Belanda. Mereka menuduh *de Inlandsche studenten* telah dihindangi semangat revolusioner yang susah dikikis. ■

TEMPO, 18 Agustus 2002



Bung Hatta (kedua dari kanan) mengajar pemuda setempat ketika diasingkan di Banda, 1936-1941

“Is Hatta Marxist?”

Tahun 1938. Setumpuk majalah *Sin Tit Po* yang dipesan Mohammad Hatta tiba di Banda.

Hatta terkesiap. Sebuah karangan dengan judul provokatif, *Is Hatta Marxist*, dimuat bersambung di edisi April dan Mei. Penulisnya: Mevrow Vodegel Sumarah. Alamatnya: Besancon, Prancis.

Artikel itu menyerang tulisan Hatta: *Enige Grondtrekken van de Economische Wereldbouw* (“Segi-Segi Utama Ekonomi Dunia”), yang dimuat di *Sin Tit Po* edisi 6, 7, 8, dan 9. Hatta yakin Mevrow Sumarah adalah nama samaran. Ia curiga sang pengarang berdomisili di Jawa. Ia lalu membalas dengan risalah berjudul *Marxisme of Epigonenwijsheid?* (“Marxisme atau Kearifan Sang Epigon?”).

Itulah Hatta sang pemikir. Dalam pembuangan pun ia berpolemik.

Enam puluh empat tahun silam, di Banda, dalam rangka kursus, Hatta menulis risalah tentang teori Marx. Kritiknya terhadap Marx: Marx tak memperhitungkan munculnya banyak faktor irasionalitas dalam masyarakat. Buruh yang dibelanya, dalam kasus Jerman, malah mendukung fasisme dan menindas kelas mereka sendiri. Irasionalitas memang ada di mana-mana. ■

TEMPO, 18 Agustus 2002



Soekarno-Hatta saat Musyawarah Nasional, 1957.

Hatta yakin partai-partai nasionalis justru akan menjadi kuat dengan saling bersaing dalam ide dan program.

Hatta adalah pengkritik paling tajam sekaligus sahabat hingga akhir hayat Soekarno.

Dalam banyak hal perbedaan dua tokoh yang dikenal sebagai Dwitunggal ini memang sejauh bumi dan langit. Keduanya sering tak sejalur dalam pandangan politik ataupun cara perjuangan.

Perbedaan itu, menurut Mavis Rose dalam bukunya *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, telah tampak pada periode 1920-an. Soekarno dan kelompok studi umum kerap berseberangan pendapat dengan kelompok eks Perhimpunan Indonesia Belanda, tempat Hatta terhimpun di dalamnya, terutama soal konsep pembentukan partai dan keanggotaannya. Soekarno lebih suka cara-cara penggalangan kekuatan massa, sedangkan Hatta-Sjahrir percaya pendidikan dan kaderisasilah yang harus diutamakan.

Bagaimana mereka memandang persatuan, menurut John Ingleson (*Jalan ke Pengasingan*), juga kontras. Hatta tak dapat menerima pendirian Soekarno bahwa semua pokok pertengkar partai harus disingkirkan. Hatta yakin partai-partai nasionalis justru akan menjadi kuat dengan saling bersaing dalam ide dan program. ■

TEMPO, 18 Agustus 2002



Mengunjungi Pulau Bangka bersama delegasi Komisi Tiga Negara, 15 Januari 1949.

“Janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.”

Pada tanggal 15 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang bersidang di Pejambon, terlibat dalam debat panas (lihat *Risalah Sidang BPUPKI, SetNeg R.I. 1992*): Haruskah kebebasan-kebebasan demokratis—hak menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan hak berserikat—ditetapkan dalam undang-undang dasar atau tidak? Soekarno (dan Supomo) dengan gigih menolak, sedangkan Hatta (Muhammad Yamin, dan lain-lain) mendukung.

Menarik sekali melihat argumentasi masing-masing. Soekarno mendasarkan penolakannya pada dua argumen. Pertama, menyatakan bahwa warga negara secara individual memiliki hak-hak dasar tertentu sama dengan membuka pintu bagi individualisme: “Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu” (*Risalah 207*). Kedua, menurut Soekarno, rakyat memerlukan keadilan sosial, padahal kebebasan-kebebasan itu “tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan”.

Mohammad Hatta pun menolak liberalisme. Tetapi ia mengajukan suatu kekhawatiran yang rupa-rupanya di luar bayangan Soekarno. Hatta: “Janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan” (*Risalah 209*). Hatta mengkhawatirkan munculnya negara kekuasaan. Soekarno tidak menanggapi kekhawatiran Hatta ini. Apakah karena ia tidak dapat membayangkan bahwa sesudah kaum kolonialis diusir, para pemimpin Indonesia sendiri bisa menjadi diktator dan penindas? ■

(*Bung Hatta dan Demokrasi*, Franz Magnis-Suseno, S.J.)
TEMPO, 18 Agustus 2002



**Agar perut rakyat terisi,
kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu
lapar bukan karena panen buruk
atau alam miskin, melainkan
karena rakyat tidak berdaya.**

Hatta tidak mau mempertentangkan keadilan sosial dengan hak-hak demokratis. Dalam sebuah pidato di Aceh (1970), ia menulis: "Apakah yang dimaksud dengan Indonesia yang adil? Indonesia yang adil maksudnya tak lain daripada memberikan perasaan kepada seluruh rakyat bahwa ia dalam segala segi kehidupannya diperlakukan secara adil dengan tiada dibedakan sebagai warga negara. Itu akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas sampai ke bawah berdasarkan kedaulatan rakyat."

Hatta di sini menyadari sesuatu yang amat penting: Keadilan sosial, dan sebagai akibatnya, kesejahteraan rakyat, justru mengandaikan kedaulatan rakyat. Agar perut rakyat terisi, *kedaulatan rakyat perlu ditegakkan*. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya.

Menolak pemastian hak rakyat untuk menyuarakan sendiri apa yang dibutuhkan dan diharapkannya akan menghasilkan "negara penyelenggara" ala Orde Baru, ketika rakyat disuruh dengan diam menerima penyelenggaraan kesejahteraannya oleh elite dari atas yang tanpa mengenal malu memanfaatkan ketidakberdayaan rakyat untuk mengalihkan semakin banyak dari hasil kerja sosial ke dalam kantong mereka sendiri. ■

**(Bung Hatta dan Demokrasi, Franz Magnis-Suseno, S.J.)
TEMPO, 18 Agustus 2002**



Bicara tentang “demokrasi *aseli*” Indonesia bisa melegitimasi bentuk kedaulatan rakyat di mana rakyat lagi-lagi tidak berdaulat.

Topik “kolektivisme” masyarakat Indonesia, “demokrasi *aseli* Indonesia” atau “demokrasi desa” sering menjadi acuan para pendiri Republik. Adalah Hatta yang, berhadapan dengan pelbagai kedangkalan yang lazim didengung-dengungkan, merincikan dengan jernih apa yang dimaksud. Ia memakai istilah “demokrasi desa”, tetapi (dalam *Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat*) ia menolak omongan tentang “demokrasi asli Indonesia” sebagai “semboyan kosong tidak berisi”.

Distingsi itu penting. Istilah “demokrasi *aseli*” bisa memberi kesan seakan-akan di wilayah Nusantara sejak dulu ada sistem pemerintahan demokratis. Tetapi struktur kekuasaan tradisional di Nusantara tentu selalu feodal dan otokratis, dan rakyat hanya dipakai demi kepentingan raja. Hatta sangat antifeodalisme. Ia mempersalahkan “kaum ningrat” atas penegakan kekuasaan kolonialisme. Dan ia sangat khawatir jangan sampai “kalau Indonesia sampai merdeka... kekuasaan... jatuh ke dalam tangan kaum ningrat.... Dan dalam Indonesia Merdeka yang seperti itu tidak berarti rakyat merdeka!” Implikasinya: Bicara tentang “demokrasi *aseli*” bisa melegitimasi bentuk kedaulatan rakyat di mana rakyat lagi-lagi tidak berdaulat.

Lain halnya “demokrasi desa”. Demokrasi itu merupakan kenyataan dalam lingkungan komunal desa. Demokrasi desa terdiri atas tiga hal: “Musyawarat dan mufakat”, “hak rakyat” untuk mengadakan “protes”, dan “cita-cita tolong-menolong”. Demokrasi desa itu bagi Hatta bukan sebuah model negara demokratis seakan-akan daripadanya bisa dibangun demokrasi yang lain daripada “demokrasi Barat”. Melainkan demokrasi desa merupakan medan latihan untuk menumbangkan sikap-sikap demokratis. Di situ rakyat sudah biasa mengambil keputusan bersama, berkompromi, berdebat, dan akhirnya mendukung mufakat bersama, untuk mengembangkan sikap-sikap yang memang diperlukan dalam demokrasi modern. ■

(Bung Hatta dan *Demokrasi*, Franz Magnis-Suseno, S.J.)
TEMPO, 18 Agustus 2002



Apabila perekonomian dikuasai oleh sebuah minoritas, para pemilik modal, bagaimana rakyat dapat betul-betul berdaulat?

Apakah kedaulatan rakyat bagi Hatta terwujud dalam “demokrasi Barat”? Ya dan tidak. Ya dalam pengertian politik. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan berdaulat betul-betul kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di Barat.

Apabila perekonomian dikuasai oleh sebuah minoritas, para pemilik modal, bagaimana rakyat dapat betul-betul berdaulat? Inilah kritik paling mendasar Hatta terhadap pengertian masyarakat demokratis di Barat. Dan meskipun sampai hari ini, apalagi dengan keambrokan semua sistem sosialisme, pengertian “demokrasi ekonomi” tetap belum dapat dibumikan, siapa yang dapat menyangkal bahwa kritik Hatta tersebut mengenai sebuah masalah dan tantangan terbesar bukan hanya bagi Indonesia, melainkan, memang, bagi segenap masyarakat yang betul-betul mau demokratis? ■

*(Bung Hatta dan Demokrasi, Franz Magnis-Suseno, S.J.)
TEMPO, 18 Agustus 2002*



Peran Besar Bung Kecil

Sutan Sjahrir adalah satu dari tujuh "Bapak Revolusi Indonesia"*. Dia mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan walau dia sendiri absen dari peristiwa besar itu. Dia memilih jalan elegan untuk menghalau penjajah. Yakni melalui diplomasi: cara yang ditentang "Bapak Revolusi" lain. Ideologinya, antifasis dan antimiliter, dikritik hanya untuk kaum terdidik. Maka dia dituduh elitis. Sejatinnya, Sjahrir juga turun ke gubuk-gubuk, berkeliling Tanah Air menghimpun kader Partai Sosialis Indonesia.

Sjahrir telah mewanti-wanti bahaya militerisme karena kecenderungan pejabat militer yang suka ikut campur urusan politik. Ia mengkampanyekan ideologi sosialisme kerakyatan yang antifasis dan antifeodal dengan menganjurkan kebebasan individu dan menghormati martabat manusia. Dalam pamfletnya yang terkenal, *Perdjoeangan Kita*, ia menulis, "Perjuangan kita sekarang ini tak lain dari perjuangan untuk mendapat kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia yang dewasa bagi diri kita."

Sejarah telah menyingkirkan peran besar Bung Kecil—begitu Sjahrir biasa disebut. Meninggal dalam pengasingan, Sjahrir adalah revolusioner yang gugur dalam kesepian. ■

TEMPO, 15 Maret 2009

* Harry A. Poeze: *Kepa Samia Singkat Tan Malaka dan Sjahrir*, Tempo, 15 Maret 2009. Poeze menyebut Tujuh Begawan Revolusi Indonesia. Ketujuh orang itu adalah Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, Tan Malaka, Soedirman, dan A.H. Nasution.



Sjahrir saat ditemui para pemuda rakyat di Cirebon, 1945.

Ketika Sjahrir mendengar dari radionya Jepang hampir kalah, dia ingin kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan.

Pada Juli 1942, atas permintaan Soekarno, yang baru kembali dari pembuangan di Sumatera, Sjahrir, Hatta, dan Soekarno melakukan rapat di rumah Hatta. Asmara Hadi, orang kepercayaan Soekarno, ikut dalam pertemuan itu. Malam itu ketiganya sepakat: Soekarno bersama Hatta akan bekerja sama dengan Jepang, dan Sjahrir tetap menyusun perlawanan di bawah tanah.

Sebagai motor gerakan bawah tanah, Sjahrir rajin menggelar diskusi. Selain di rumahnya sendiri, Sjahrir sering berdiskusi di daerah Manggarai, Jakarta. Peserta tetapnya antara lain Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, Mr Soejitno, Ali Budiardjo, dokter Soedarsono, Zainal Abidin, Hamdani, dan dokter Toha.

Jika tidak di Manggarai, diskusi digelar di Sindanglaya, Cipanas. Ini rumah Halim, salah satu kerabat Sjahrir. Ikut dalam lingkaran diskusi Sjahrir: mahasiswa kedokteran seperti Soedjatmoko, Abu Bakar Lubis, Subianto, dan Suroto Kunto.

Untuk mengetahui perkembangan perang Jepang melawan Sekutu, Sjahrir mengandalkan siaran radio, termasuk dari BBC. Ketika Sjahrir mendengar dari radionya Jepang hampir kalah, dia ingin kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Tapi Soekarno memilih menunggu lampu hijau dari Jepang. Sjahrir jengkel. Maka, pada Juli 1944, ketika mendengar Tan Malaka ada di Bayah, Banten, menyamar sebagai Ibrahim, dia segera mencari Tan. Sjahrir meminta Tan Malaka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi tokoh komunis itu juga menolak. ■

TEMPO, 15 Maret 2009



Sjahrir menyalami Hatta setelah pulang dari Yogyakarta, 1947.

"Sosialisme yang kita perjuangkan adalah sosialisme yang memerdekakan manusia dari penindasan dan pengisapan oleh manusia."

Dalam banyak esainya, terutama dalam buku *Sosialisme Indonesia Pembangunan* (1982), Sjahrir menyerang pelbagai hal dengan sederet argumentasi yang meyakinkan. Ia menyerang komunisme sebagai ideologi yang mengkhianati sosialisme karena mengabaikan kemanusiaan, seperti Stalin di Rusia, Mao Zedong di Cina, Pol Pot di Vietnam. "Sosialisme yang kita perjuangkan adalah sosialisme yang memerdekakan manusia dari penindasan dan pengisapan oleh manusia," tulisnya.

Para penentangannya mengejek Sjahrir dengan sebutan "soska" alias sosialis kanan karena keterpukauannya kepada segala yang berbau Barat: mengkritik kekolotan, tradisi, dan primordialisme. Sejak muda, tokoh kelahiran Padang Panjang pada 5 Maret 1909 itu menyatakan telah berpisah dengan adat Minang. ■

TEMPO, 15 Maret 2009



Pidato Sjahrir di kongres pertama Partai Sosialis Indonesia, 1952. Selalu mengingatkan tetap memperjuangkan nasib buruh.

Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam demokrasi sering kali masih menutup mata terhadap penghisapan satu golongan terhadap golongan lain yang jauh lebih besar.

Dalam pidatonya di depan Kongres Sosialis Asia II di Bombay pada 6 November 1956 Sjahrir berkata: "Kaum sosial kerakyatan di Asia menyadari bahwa mereka mempunyai ketidaksabaran revolusioner yang sama dengan kaum komunis, tetapi mereka melihat dengan sangat jelas bahwa kaum komunis telah menempuh suatu jalan yang salah. Dituntun oleh ajaran-ajaran Lenin dan Stalin mengenai perjuangan kelas dan kesusilaan kelas, mereka menghancurkan, dalam diri mereka sendiri, jiwa serta semangat sosialisme, yaitu kemampuan menghargai kemanusiaan dan martabat manusia." Di sini terlihat Sjahrir berpaling ke demokrasi, yang mengakui bahwa secara politik rakyat berhak memerintah dirinya sendiri berdasarkan asas kedaulatan rakyat, dan secara moral kedudukan, hak serta martabat setiap orang harus dihormati dan dibela berdasarkan prinsip *human dignity*.

Dia menentang kekuasaan politik yang ditentukan berdasarkan susunan hierarkis dalam feodalisme maupun dalam politbiro ala Bolsyevik. Menurut Sjahrir, dalam pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dan martabat manusia, sosialisme yang dianutnya sejalan dengan demokrasi liberal, tetapi dengan satu perbedaan. Yaitu, bahwa pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dalam demokrasi sering kali masih menutup mata terhadap penghisapan satu golongan terhadap golongan lain yang jauh lebih besar. ■

(Sutan Sjahrir: *Titian Sosialisme ke Demokrasi*, Ignas Kleden)
TEMPO, 15 Maret 2009



Presiden Soekarno berbincang dengan Sutan Sjahrir di resepsi makan malam menyambut kedatangan Nehru di Istana Merdeka, Jakarta, 1946.

Dia percaya bahwa baik sosialisme maupun demokrasi hanya bisa diwujudkan melalui kekuatan akal dan bukannya melalui jalan kekerasan.

Perwujudan kedaulatan rakyat hanya mungkin terlaksana apabila suatu bangsa sudah terbebas dari penjajahan asing. Karena itu Sjahrir memihak sepenuh hati kepada perjuangan kemerdekaan dan turut mendukung dengan caranya sendiri apa yang dinamakannya revolusi nasional, yang membuatnya dapat bekerja sama dengan tokoh lain yang menjadi sasaran kritiknya seperti Soekarno dan Tan Malaka. Akan tetapi dalam keyakinannya, revolusi nasional itu harus segera disusul oleh revolusi sosial, untuk mengubah susunan dan pandangan masyarakat agar pimpinan politik tidak telanjur jatuh ke tangan orang-orang yang berpikiran feodal. Kalau ini terjadi keadaannya akan menjadi sangat berbahaya karena susunan hierarkis feodal dapat segera bersekutu dengan fasisme, yang dengan mudah memanipulasi nasionalisme yang tak terkendali menjadi chauvinisme, yang bakal mempersulit pergaulan demokratis pada tingkat internasional.

Dia percaya bahwa baik sosialisme maupun demokrasi hanya bisa diwujudkan melalui kekuatan akal dan bukannya melalui jalan kekerasan. Namun sekaligus diperingatkannya bahwa penggunaan akal dapat membawa orang kepada pendewaan akal dalam ilmu pengetahuan, suatu hal yang jelas ditentang oleh tuntutan akal itu sendiri. Dia seakan meramalkan secara intuitif *Dialektik der Aufklaerung* (dialektik pencerahan) yang dicanangkan Max Horkheimer dan Theodor Adorno dari mazhab Frankfurt pada 1969, bahwa akal yang kehilangan kritik terhadap dirinya bakal membunuh dirinya sendiri. ■

(Sutan Sjahrir: *Titian Sosialisme ke Demokrasi*, Ignas Kleden)
TEMPO, 15 Maret 2009



“Yang diincar Persatuan Perjuangan bukanlah Sjahrir, melainkan Soekarno.”

Dalam banyak hal, Sjahrir berbeda dengan Tan Malaka. Sjahrir melihat pengakuan kedaulatan dari negara lain itu penting, sehingga jalur diplomasi termasuk dengan Belanda perlu dibuka. Bagi Tan Malaka, pengakuan kemerdekaan, “Bukanlah syarat eksistensi Republik Indonesia.” *Dus*, berunding dengan Belanda tak ada perlunya.

Namun “permusuhan” keduanya sebenarnya panas karena salah paham. Ketika Tan mendeklarasikan program minimum dan Persatuan Perjuangan pada 15 Januari 1946, banyak kalangan melihat itu sebagai oposisi terhadap Perdana Menteri Sjahrir. Tapi, menurut Subadio, Perjuangan hanyalah panggung untuk mendongkrak popularitas Tan. Dan yang diincar Perjuangan bukanlah Sjahrir, melainkan Soekarno.

Hubungan Sjahrir dengan Tan tambah buruk ketika sebulan setelah Persatuan Perjuangan berdiri, Tan dan beberapa anak buahnya ditangkap dan dibui. Tak jelas apa alasannya sebab tak ada pengadilan atas mereka. “Saya tidak mengerti siapa yang melakukan itu, mengapa dan atas wewenang apa,” kata Tan, dua tahun kemudian.

Surat perintah penangkapan Tan diteken Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin. Menurut Amir, dia bertindak berdasar perintah tertulis Sjahrir. Entah betul atau tidak pengakuan Amir, sebab tak pernah ditunjukkan surat perintah dari Sjahrir. Pengikut setia Tan, Adam Malik, meyakini penangkapan itu ulah Amir. ■

TEMPO, 15 Maret 2009



Tan malaka. Dalam tahanan pemerintahan Perdana Menteri Sjahrir, 1946.

"Sesudah lebih daripada dua puluh tahun di belakang ini, saya tiada ingin akan menjadi teman separtai kaum sosialis, yang kebanyakan masih mau berkompromi dengan kapitalis-imperialis itu."

Di Serang, Sjahrir meminta Tan Malaka menjadi Ketua Partai Sosialis yang segera didirikan. Reputasi Tan yang legendaris dipandang dapat memperkuat basis kekuasaan yang solid bagi Sjahrir.

Tan Malaka menolak tawaran itu. Dalam pandangannya, partai-partai yang tumbuh seperti jamur di musim hujan hanya membawa perpecahan dan mengancam persatuan yang begitu diperlukan bagi perjuangan melawan Belanda. Tan Malaka menegaskan prinsipnya: "Sesudah lebih daripada dua puluh tahun di belakang ini, saya tiada ingin akan menjadi teman separtai kaum sosialis, yang kebanyakan masih mau berkompromi dengan kapitalis-imperialis itu." Kepada pengikut setianya, Maroeto Nitimihardjo, ia bahkan lebih terus terang, "Aku tak bisa melakukan ini, aku Komunis."

Inilah akhir kerja sama kedua tokoh ini—Sjahrir memilih garis lebih moderat, Tan Malaka mengorganisasikan alternatif lebih radikal. Keduanya tak pernah bertemu lagi.

(Kerja Sama Singkat Tan Malaka dan Sjahrir, Harry Poeze)
TEMPO, 15 Maret 2009





Sjahrir dan Jenderal Sudirman. Berselisih paham dalam meraih dan mempertahankan kedaulatan, akhirnya saling mengawasi.

Pamflet *Perdjoeangan Kita* ditulis dan diterbitkan pada 10 November 1945, lima hari sebelum Sjahrir menjadi perdana menteri, bertepatan dengan bentrok fisik para pemuda dengan tentara Inggris di Surabaya. Hari yang ditandai dengan pekik "Merdeka atau Mati" itu kini dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Dengan penuh gelora dan kritik tajam, Sjahrir melukiskan situasi Indonesia di awal kemerdekaan itu pada bagian pertama *Perdjoeangan Kita*. Dengan jernih Sjahrir menunjukkan bahwa kerusuhan, pemecahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, serta agitasi kebencian kepada ras bangsa Jepang akan menimbulkan sebuah kekuatan fasis baru dari dalam negeri sendiri.

Ia mengkritik, pekik merdeka hanya simbol kosong dari euforia kebebasan. Proklamasi 17 Agustus 1945 ia hantam sebagai peluang menyusun kekuasaan tapi tak dipakai oleh para pemimpin karena mereka "terbiasa membungkuk dan berlari untuk Jepang dan Belanda". Sjahrir sendiri absen saat Soekarno-Hatta membacakan pernyataan Indonesia merdeka itu.

Bagian kedua pamflet ini mengurai bagaimana seharusnya Indonesia menyusun kekuatan dan menegakkan Republik. Bagi Sjahrir, kekuatan itu harus dimulai dengan "revolusi kerakyatan", revolusi yang dipimpin golongan demokratis, bukan nasionalis yang membudak kepada fasis lain. "*Politieke collaboratoren* harus dipandang juga sebagai fasis, berdosa dan berkhianat pada perjuangan dan revolusi rakyat," tulisnya.

Kalimat inilah yang memicu kemarahan tokoh politik ketika itu. Jenderal Sudirman, pemimpin tentara Pembela Tanah Air yang dibentuk Jepang, menyebut pernyataan Sjahrir kurang bijak.

Meski ditentang kanan-kiri, Sjahrir jalan terus. Ia mengubah sistem presidensial dengan parlementer, sebagaimana keyakinannya dalam pamflet ini bahwa kedaulatan harus ada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Partai-partai harus dibentuk oleh mereka yang terdidik, berdisiplin, dan berpengetahuan modern untuk membawa rakyat ke dalam revolusi.

Pada bagian akhir pamflet ini, Sjahrir menjelaskan agak teknis soal menyusun alat-alat pemerintahan: bagaimana memfungsikan pangreh praja, polisi, dan petugas agraria. Ia menyerukan buruh dan tani diperkuat melalui pendidikan politik sebagai kekuatan revolusioner yang demokratis. Pemilihan-pemilihan harus dimulai di desa. Pemuda, sementara itu, harus menyokong buruh dan tani, bukan pemimpin revolusi itu sendiri.

Ia juga menyinggung soal politik luar negeri. Menurut Sjahrir, kemerdekaan sesungguhnya harus dicapai secara bertahap, rapi, dan elegan, bukan frontal dengan angkat senjata. Maka ia mempraktekkan politik diplomasi: berunding dengan Belanda dan Sekutu serta melecut simpati dunia internasional. ■

TEMPO, 15 Maret 2009



Sjahrir disambut massa di Jakarta setelah perjanjian Linggarjati, 1946.

"Aku relatif kurang populer di kalangan orang-orang nasionalis dan intelektual di Indonesia. Ini untuk sebagian besar disebabkan karena aku mempunyai apa yang disebut mereka itu "kecenderungan-kecenderungan Barat" dan beberapa orang malahan mengatakan aku "kebelanda-belandaan" (Banda Neira, 9 Maret 1936).

Hampir sebulan dibuang di Banda Neira, Sjahrir menuliskan kalimat itu. Dengan tutur kata yang tenang, tak meledak-ledak, Sjahrir selanjutnya memasuki perenungan mengapa makin lama di Indonesia tumbuh perasaan anti-Barat yang kuat. Sebuah sikap yang menurut dia merupakan bagian dari kompleks kurang harga diri sebuah bangsa.

Di Banda Neira pikiran-pikirannya tentang Barat makin eksplisit. *"Barat" bagiku berarti kehidupan yang menggelora, kehidupan yang mendesak maju, kehidupan dinamis. Itulah sifat Faust, sifat yang kusukai, dan aku yakin bahwa hanya Barat—yaitu dalam pengertian dinamis ini—yang bisa melepaskan Timur dari perbudakannya."*

Selanjutnya lihatlah bagaimana saat Sjahrir menerangkan "Timur". Menurut dia, banyak intelektual Indonesia yang terperangkap oleh gambaran Timur yang sesungguhnya diidealisasi oleh beberapa filosof. Timur yang tenang, yang harmoni, suatu Timur yang tak pernah ada. *"Timur seperti dilihat orang-orang Buddhis itu, hanya ada bagi mereka saja. Apakah masih ada Timur semacam itu di Hong Kong atau Shanghai, atau Batavia? Di mana-mana di Timur ini irama hidup, tempo sudah dipercepat. Ketenteraman jiwa yang sangat dihasratkan itu mungkin masih kedapatan di pelosok-pelosok."*

Kita dapat melihat orientasi dasar Sjahrir terhadap Barat itu, amat melandasi sikap-sikap politiknya, misalnya: sikapnya terhadap nasionalisme yang ekstrem. Sjahrir mengkritik perjuangan politik yang di negeri ini cenderung harus mempunyai unsur moral yang kuat. *"Politik untuk orang-orang kita di sini bukan berarti: perhitungan, melainkan bertindak etis, berbuat dan bersikap moral tinggi. Pemimpin-pemimpin haruslah pahlawan-pahlawan, nabi-nabi."*

Ia juga mengkritik adanya kebencian yang tak kenal damai dengan Belanda. Pada Maret 1938, Sjahrir menulis surat bagaimana ia tak ingin terlibat dalam gerakan non-kooperasi. Sjahrir melihat gerakan non-kooperasi sudah diangkat menjadi soal kehormatan. Baginya, itu cermin dari mentalitas inferioritas. Pada titik itu, secara tajam ia menganggap nasionalisme yang ekstrem bisa menjadi timbul dari rasa rendah diri ini.

Ia menulis: *"Aku hampir-hampir hendak mengatakan bahwa nasionalisme ialah proyeksi daripada kompleks inferioritas dalam hubungan kolonial antara bangsa yang dijajah dan bangsa yang menjajah. Jadi, dari semula dasar dari propaganda nasionalistis adalah suatu perasaan yang tidak rasional."* ■

TEMPO, 15 Maret 2009



Hatinya terlalu teguh untuk berkompromi. Ia orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Tapi hidupnya berakhir tragis di ujung senapan tentara republik yang didirikannya.

Hatinya terlalu teguh untuk berkompromi. Maka ia diburu polisi rahasia Belanda, Inggris, Amerika, dan Jepang di 11 negara demi cita-cita utama: kemerdekaan Indonesia.

Namanya Tan Malaka, atau Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ia orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin menjulukinya "Bapak Republik Indonesia". Soekarno menyebutnya "seorang yang mahir dalam revolusi". Tapi hidupnya berakhir tragis di ujung senapan tentara republik yang didirikannya.

Ia seorang yang telah melukis revolusi Indonesia dengan bergelora, dan kini mungkin dua-tiga generasi melupakan sosoknya yang lengkap ini: kaya gagasan filosofis, tapi juga lincah berorganisasi.

Orde Baru telah melabur hitam peran sejarahnya. Tapi, harus diakui, di mata sebagian anak muda, Tan mempunyai daya tarik yang tak tertahankan. Sewaktu Soeharto berkuasa, menggali pemikiran serta langkah-langkah politik Tan sama seperti membaca novel-novel Pramoedya Ananta Toer. Buku-bukunya disebarluaskan lewat jaringan klandestin. Diskusi yang membahas alam pikirannya dilangsungkan secara berbisik. Meski dalam perjalanan hidupnya Tan akhirnya berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), sosoknya sering kali dihubungkan dengan PKI: musuh abadi Orde Baru.

Perlakuan serupa menimpa Tan di masa Soekarno berkuasa. Soekarno, melalui kabinet Sjahrir, memenjarakan Tan selama dua setengah tahun, tanpa pengadilan. Perseteruannya dengan para pemimpin pucuk PKI membuat ia terlempar dari lingkaran kekuasaan. Ketika PKI akrab dengan kekuasaan, Bung Karno memilih Musso—orang yang telah bersumpah menggantung Tan karena pertikaian internal partai—ketimbang Tan. ■

TEMPO, 17 Agustus 2008



Rapat raksasa di Lapangan Ikada (sekarang Monas), 1945. Tan Malaka (dalam lingkaran) mengorganisasi massa.

Buku *Naar de Republiek* dan *Massa Actie* (1926) yang ditulis dari tanah pelarian itu telah menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia.

Di sepanjang hidupnya, Tan telah menempuh pelbagai royan: dari masa akhir Perang Dunia I, revolusi Bolsyewik, hingga Perang Dunia II. Di kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia, lelaki kelahiran Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 2 Juni 1897 ini merupakan tokoh pertama yang menggagas secara tertulis konsep Republik Indonesia. Ia menulis *Naar de Republiek Indonesia* (*Menuju Republik Indonesia*) pada 1925, jauh lebih dulu dibanding Mohammad Hatta, yang menulis *Indonesia Vrije* (*Indonesia Merdeka*) sebagai pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag (1928), dan Bung Karno, yang menulis *Menuju Indonesia Merdeka* (1933).

Buku *Naar de Republiek* dan *Massa Actie* (1926) yang ditulis dari tanah pelarian itu telah menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Tokoh pemuda radikal Sayuti Melik, misalnya, mengenang bagaimana Bung Karno dan Ir. Anwar membawa dan mencoret-coret hal penting dari *Massa Actie*. Waktu itu Bung Karno memimpin Klub Debat Bandung. Salah satu tuduhan yang memberatkan Soekarno ketika diadili di Landrat Bandung pada 1931 juga lantaran menyimpan buku terlarang ini. Tak aneh jika isi buku itu menjadi ilham dan dikutip Bung Karno dalam pleidoinya, *Indonesia Menggugat*.

W.R. Supratman pun telah membaca habis *Massa Actie*. Ia memasukkan kalimat "Indonesia tanah tumpah darahku" ke dalam lagu *Indonesia Raya* setelah diilhami bagian akhir dari *Massa Actie*, pada bab bertajuk "Khayal Seorang Revolusioner". Di situ Tan antara lain menulis, "Di muka barisan laskar, itulah tempatmu berdiri.... Kewajiban seorang yang tahu kewajiban putra tumpah darahnya." ■

TEMPO, 17 Agustus 2008



Coretan heroik di Cikini, Jakarta, pada awal-awal kemerdekaan. Diinspirasi oleh Tan Malaka.

Sebagai pemimpin revolusi Soekarno semestinya mengedepankan perlawanan gerilya ketimbang menyerah. Perundingan hanya bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100% dari Belanda dan Sekutu.

Tan tak pernah menyerah. Mungkin itulah yang membuatnya sangat kecewa dengan Soekarno-Hatta yang memilih berunding dan kemudian ditangkap Belanda. Tan berukuh, sebagai pemimpin revolusi Soekarno semestinya mengedepankan perlawanan gerilya ketimbang menyerah. Baginya, perundingan hanya bisa dilakukan setelah ada pengakuan kemerdekaan Indonesia 100 persen dari Belanda dan Sekutu. Tanpa itu, nonsens.

Sebelum melawan Soekarno, Tan pernah melawan arus dalam kongres Komunisme Internasional di Moskow pada 1922. Ia mengungkapkan gerakan komunis di Indonesia tak akan berhasil mengusir kolonialisme jika tak bekerja sama dengan Pan-Islamisme. Ia juga menolak rencana kelompok Prambanan menggelar pemberontakan PKI 1926/1927. Revolusi, kata Tan, tak dirancang berdasarkan logistik belaka, apalagi dengan bantuan dari luar seperti Rusia, tapi pada kekuatan massa. Saat itu otot revolusi belum terbangun baik. Postur kekuatan komunis masih ringkih. "Revolusi bukanlah sesuatu yang dikarang dalam otak," tulis Tan. Singkat kata, rencana pemberontakan itu tak matang.

Penolakan ini tak urung membuat Tan disingkirkan para pemimpin partai. Tapi, bagi Tan, partai bukanlah segala-galanya. Jauh lebih penting dari itu: kemerdekaan nasional Indonesia. Dari sini kita bisa membaca watak dan orientasi penulis *Madilog* ini. Ia seorang Marxis, tapi sekaligus nasionalis. Ia seorang komunis, tapi kata Tan, "Di depan Tuhan saya seorang muslim" (siapa sangka ia hafal Al-Quran sewaktu muda). Perhatian utamanya adalah menutup buku kolonialisme selama-lamanya dari bumi Indonesia.

TEMPO, 17 Agustus 2008





Tan Malaka dan Sukarni, 1947.

“Seratus ton arang itu diperoleh dengan makian *bagero* saja. Tanah, mesin, dan tenaga *romusha* pun digedor.”

Saat menyamar dan bekerja di Bayah, Banten Selatan, Tan pernah diminta mengurus data pekerja. Dia sering berhubungan dengan *romusha* dan mencatat jumlah kematian mereka. Dalam memoarnya, Tan mencatat 400-500 *romusha* meninggal setiap bulan. Hingga akhir pendudukan Jepang, luas tempat pemakaman *romusha* mencapai 38 hektare.

Keluar-masuk terowongan dan memberikan nasihat pentingnya kesehatan, Tan dikenal sebagai kerani yang baik hati. Dia suka membelikan makanan buat *romusha* dari upahnya sendiri. “Kita dapat mempraktekkan rasa tanggung jawab terhadap golongan bangsa Indonesia yang menjadi korban militerisme Jepang,” kata Tan suatu ketika.

Di dalam perusahaan, dia selalu mengusulkan peningkatan kesejahteraan *romusha*. Tan termasuk anti-Jepang, tapi tetap bergaul dengan mereka, termasuk pejabat direktur Kolonel Tamura. Dia mencoba berbicara mengenai kesejahteraan pekerja, tapi upayanya sia-sia.

Romusha mendapat upah 0,40 gulden (40 sen) dan 250 gram beras setiap hari. Uang 40 sen hanya cukup buat membeli satu pisang. Dalam salah satu tulisannya, *Rencana Ekonomi Berjuang*, Tan mengatakan hitung-hitungan upah *romusha* hanya di atas kertas. Tulisan itu dia buat di Surabaya pada November 1945.

Di situ Tan melukiskan kondisi *romusha* di Bayah lewat percakapan dua tokoh cerita, si Toke dan si Godam. “Seratus ton arang itu diperoleh dengan makian *bagero* saja. Tanah, mesin, dan tenaga *romusha* pun digedor,” ucap si Godam. Ringkasnya, Jepang sama sekali tidak mengeluarkan bayaran *romusha*.

Tan mencoba menggalang pemuda untuk memperbaiki nasib *romusha*. Dia menggagas dapur umum yang menyediakan makanan bagi seribu *romusha*. Mereka membangun rumah sakit di pinggiran Desa Bayah, Cikaret. Tan juga membuka kebun sayur dan buah-buahan di Tegal Lumbu, 30 kilometer dari Bayah. ■

TEMPO, 17 Agustus 2008



Sutan Sjahrir, Soekarno, dan Mohammad Hatta, 1945.

“Apakah tidak lebih tepat kemerdekaan Indonesialah kelak yang lebih menjamin kemenangan terakhir?”

Pada September 1944, Soekarno dan Hatta berkunjung ke Bayah, Banten Selatan. Tan menjadi anggota panitia penyambutan tamu. Soekarno berpidato bahwa Indonesia bersama Jepang akan mengalahkan Sekutu. Setelah itu, Jepang memberikan kemerdekaan buat Indonesia. Soekarno meminta pekerja tambang membantu berjuang dengan meningkatkan produksi batu bara.

Selesai pidato, moderator Sukarjo Wiryo Pranoto mempersilakan hadirin bertanya. Saat itu Tan sedang memilih kue dan minuman untuk para tamu. Para penanya rupanya sering mendapat jawaban guyon sinis. Kepada *Son-co* (Camat) Bayah, misalnya, Sukarjo mengejek supaya ikut kursus “Pangreh Praja”.

Tan gerah dengan suasana penuh ejekan itu. Dia pun menyimpan talam kue dan minuman di belakang, lalu bertanya: apakah tidak lebih tepat kemerdekaan Indonesialah kelak yang lebih menjamin kemenangan terakhir?

Soekarno menjawab bahwa Indonesia harus menghormati jasa Jepang menyingkirkan tentara Belanda dan Sekutu. Tan membantah. Menurut dia, rakyat akan berjuang dengan semangat lebih besar membela kemerdekaan yang ada daripada yang dijanjikan.

Tan melihat Soekarno jengkel. Menurut dia, Soekarno mungkin tidak pernah didebat ketika berpidato di seluruh Jawa. Apalagi bantahan itu dari Bayah, kota kecil di pesisir yang cuma dikenal karena urusan *romusha* dan nyamuk malaria. Tan ingin berbicara lebih panjang, tapi keburu dihentikan. ■

TEMPO, 17 Agustus 2008

Naskah dari Rawajati



Di Desa Rawajati, dekat sebuah pabrik sepatu di Kalibata, Jakarta, ia menyewa gubuk bambu. Pada sepetak ruang sekitar 15 meter persegi di rumah itulah, Ibrahim Datuk Tan Malaka, dari pukul enam pagi hingga pukul 12 siang, berkulat merangkum gagasan dan pikirannya.



Kelak buah pikiran itu mewujud dalam sebuah buku termasyhur: *Madilog* (Materialisme, Dialektika, dan Logika). Tan menulis *Madilog* sejak 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943.



Selama bermukim di Rawajati, ia kerap menyambangi Museum Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen—sekarang Museum Nasional—untuk mencari dan membaca naskah rujukan. Ke museum yang kini terletak di seberang Monumen Nasional itu ia sering berjalan kaki—kadang butuh waktu empat jam.



Bila hendak ke sana, Tan bangun pukul setengah lima subuh. Tiba di museum sekitar pukul sembilan, ia biasanya tak lebih dari satu jam di perpustakaan. Setelah sebentar mempelajari keadaan di kota, "Sorenya kembali jalan kaki menuju sarang saya di Kalibata," tulis Tan dalam memoarnya, *Dari Penjara ke Penjara II*.



Sejarawan Belanda, Harry Albert Poeze, mengatakan *Madilog* merupakan bentuk pikiran yang telah mengendap bertahun-tahun dalam diri Tan Malaka. Tan merangkum pemikirannya dari hasil bacaan selama pengembaraan di Belanda, Cina, hingga Singapura.



Tan tidak mencantumkan sumber rujukan dalam *Madilog*. Jilid pertama seluruhnya ditulis berdasarkan ingatannya. Selanjutnya, Tan menggunakan rujukan dari perpustakaan di museum yang dikunjunginya. "Tan ingin mengelakkan kesan bahwa *Madilog* sepenuhnya buah pikirannya sendiri," kata Poeze.



Selama menulis *Madilog*, Tan selalu berdiskusi dengan sejumlah pemuda. Dia banyak bercerita tentang kesengsaraan penduduk di bawah penguasaan Jepang. Karena aktivitasnya inilah, Asisten Wedana Pasar Minggu pernah datang dan mengeledah gubuknya.



Karena tak menemukan sesuatu, Asisten Wedana itu kemudian meminta maaf kepada Tan. Sang pejabat tak tahu Tan telah menyembunyikan kertas-kertasnya di kandang ayam dan sebagian lain disamarkan sebagai ganjal kaki meja.

Tan Malaka membawa naskah *Madilog* ke Bayah, Banten Selatan. *Madilog* juga dibawanya bertualang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tan baru memperkenalkan *Madilog* tiga tahun setelah kemunculannya.

Ia menulis, "Kepada mereka yang sudi menerimanya. Mereka yang sudah mendapat minimum latihan otak, berhati lapang dan saksama serta akhirnya berkemauan keras buat memahaminya." ■

TEMPO, 17 Agustus 2008



Tan Malaka sejatinya tak percaya terhadap parlemen. Bagi Tan Malaka, pembagian kekuasaan yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan parlemen hanya menghasilkan kerusakan.



Tan Malaka sebagai siswa di Belanda, 1913.

Selain bebas dari penjajahan, merdeka bagi Tan Malaka bukan berarti bebas menjarah dan menghancurkan bangsa lain. Merdeka itu dua arah: bebas dari ketakutan dan tidak menebar teror terhadap bangsa lain. Inilah prinsip Indonesia merdeka.

Setelah merdeka, bangunan Indonesia harus punya bentuk. Ketika para pejuang lain baru berpikir tentang persatuan, atau paling jauh berpikir tentang Indonesia Merdeka, Tan Malaka sudah maju beberapa langkah memikirkan Republik Indonesia. Brosur *Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia)* sudah ditulis di Kanton, Cina, pada 1925, tiga tahun sebelum deklarasi Sumpah Pemuda.

Tan Malaka tegas bahwa eks Hindia Belanda harus menjadi Republik Indonesia. Namun republik dalam gagasan Tan Malaka tak menganut trias politika ala Montesquieu. Republik versi Tan Malaka adalah sebuah negara efisien. Republik yang dikelola oleh sebuah organisasi.

Tan Malaka sejatinya tak percaya terhadap parlemen. Bagi Tan Malaka, pembagian kekuasaan yang terdiri atas eksekutif, legislatif, dan parlemen hanya menghasilkan kerusakan. Pemisahan antara orang yang membuat undang-undang dan yang menjalankan aturan menimbulkan kesenjangan antara aturan dan realitas. Pelaksana di lapangan (eksekutif) adalah pihak yang langsung berhadapan dengan persoalan yang sesungguhnya. Eksekutif selalu dibuat repot menjalankan tugas ketika aturan dibuat oleh orang-orang yang hanya melihat persoalan dari jauh (parlemen).

Demokrasi dengan sistem parlemen melakukan ritual pemilihan sekali dalam 4, 5, atau 6 tahun. Dalam kurun waktu demikian lama, mereka sudah menjelma menjadi kelompok sendiri yang sudah berpisah dari masyarakat. Sedangkan kebutuhan dan pikiran rakyat berubah-ubah. Karena para anggota parlemen itu tak bercampur-baur lagi dengan rakyat, seharusnya mereka tak berhak lagi disebut sebagai wakil rakyat.

Konsekuensinya adalah parlemen memiliki kemungkinan sangat besar menghasilkan kebijakan yang hanya menguntungkan golongan yang memiliki modal, jauh dari kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Menurut Tan, parlemen dengan sendirinya akan tergoda untuk berselingkuh dengan eksekutif, perusahaan, dan perbankan. ■

(Republik dalam Mimpi Tan Malaka, Hasan Nasbi A.)
TEMPO, 17 Agustus 2008